

REPRESENTASI MASALAH AKUNTANSI DALAM KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM FOOD STREET KOTA GORONTALO: PENDEKATAN WPR

Rapika Anwar¹, Rizka Yunika Ramly²

¹Program Studi akuntansi, Universitas Ichsan Gorontalo Utara, Indonesia,
rapikaanwar.14@gmail.com

²Program Studi akuntansi, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia,
ikhayunika@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pemberdayaan UMKM sering merepresentasikan masalah UMKM sebagai keterbatasan modal, pemasaran, legalitas, dan digitalisasi, sementara persoalan akuntansi dasar belum selalu ditempatkan sebagai fondasi pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi masalah akuntansi dalam kebijakan pemberdayaan UMKM food street Kota Gorontalo melalui pendekatan *What is the Problem Represented to be (WPR)*. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif kritis dengan informan pelaku UMKM *food street*, unsur dinas/pendamping UMKM, lembaga pembiayaan, akademisi akuntansi, dan komunitas UMKM. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan matriks analisis WPR. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan enam pertanyaan WPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM cenderung menonjolkan modal, digitalisasi, legalitas, dan akses pasar sebagai masalah utama, sedangkan pencatatan keuangan, pemisahan uang usaha dan pribadi, informasi biaya, pengukuran laba, bukti transaksi, dan kesiapan SAK EMKM belum menjadi perhatian dominan. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi pemberdayaan UMKM berbasis akuntabilitas keuangan melalui buku kas harian, pemisahan kas, perhitungan biaya sederhana, dan pendampingan SAK EMKM.

Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan, Kebijakan UMKM, SAK EMKM, UMKM Food Street, WPR

Abstract

MSME empowerment policies often represent MSME issues as limited capital, marketing, legality, and digitalization, while basic accounting issues have not always been placed as the foundation of empowerment. This study aims to analyze the representation of accounting problems in the empowerment policy of food street MSMEs in Gorontalo City through the What is the Problem Represented to be (WPR) approach. This research uses a critical qualitative design with informants of food street MSME actors, elements of MSME offices/assistants, financing institutions, accounting academics, and the MSME community. The research instruments include interview guidelines, observation sheets, and WPR analysis matrices. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, then analyzed using six WPR questions. The results of the study show that MSME empowerment policies tend

to highlight capital, digitalization, legality, and market access as the main issues, while financial recording, separation of business and personal money, cost information, profit measurement, proof of transactions, and SAK EMKM readiness have not been the dominant concerns. The implications of this study confirm the need for a reformulation of MSME empowerment based on financial accountability through daily cash books, cash segregation, simple cost calculations, and SAK EMKM assistance.

Keywords: *Financial Accountability, MSME Policy, SAK EMKM, MSME Food Street, WPR*

*✉ Corresponding author:

Rapika Anwar

rapikaanwar.14@gmail.com

Article History:

Received June 18, 2026

Revised June 22, 2026

Accepted June 23, 2026

PENDAHULUAN

UMKM *food street*, yaitu usaha kuliner jalanan yang berkembang dalam ruang ekonomi perkotaan dengan karakter transaksi harian, modal relatif kecil, perputaran kas cepat, dan hubungan langsung dengan konsumen. Di Kota Gorontalo, usaha kuliner menjadi salah satu jenis UMKM yang dominan. Kajian tentang UMKM kuliner Kota Gorontalo mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 6.985 usaha kuliner dari total 11.806 UMKM. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor kuliner memiliki posisi penting dalam struktur UMKM Kota Gorontalo (Sholeh et al, 2025). UMKM *food street* Kota Gorontalo menarik dikaji dari perspektif akuntansi karena praktik keuangannya sering berlangsung sederhana dan berbasis kas. Pelaku usaha menerima pendapatan harian, membeli bahan baku secara rutin, menentukan harga berdasarkan pengalaman, dan menggunakan hasil penjualan untuk kebutuhan usaha sekaligus kebutuhan keluarga. Praktik tersebut menyebabkan batas antara uang usaha dan uang pribadi sering menjadi kabur. Dalam perspektif *Entity theory*, usaha dipandang sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Pemisahan ini diperlukan agar transaksi usaha dapat dicatat, diukur, dan dilaporkan secara wajar (Hermawan, 2018; CLark, 1993). Pada UMKM *food street*, prinsip entitas menjadi penting karena pelaku usaha sering merangkap sebagai pemilik, pengelola, kasir, pembeli bahan baku, dan pengambil Keputusan

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi masalah dalam kebijakan pemberdayaan UMKM dan kebutuhan akuntansi pelaku usaha. Pelaku UMKM dapat menjadi lebih dikenal secara digital, tetapi tetap tidak mengetahui laba bersih. Pelaku UMKM dapat memperoleh legalitas, tetapi tetap tidak mampu menyusun laporan keuangan. Pelaku UMKM dapat menerima bantuan modal, tetapi tetap mencampur uang usaha dan uang pribadi. Pertanyaan tersebut penting karena cara kebijakan mendefinisikan masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan. Apabila masalah UMKM direpresentasikan sebagai kurang modal, solusi dominan adalah bantuan modal. Apabila masalah direpresentasikan sebagai kurang pemasaran, solusi dominan adalah pelatihan promosi. Namun, apabila masalah UMKM direpresentasikan sebagai lemahnya akuntabilitas keuangan, solusi yang dibutuhkan adalah pencatatan sederhana, pemisahan kas usaha dan pribadi, perhitungan biaya, laporan laba rugi sederhana, dan pendampingan SAK EMKM (Ayem et al., 2024; Beatrix Yunarti Manehat, 2022)

Penelitian ini menggunakan pendekatan *What is the Problem Represented to be* atau WPR yang dikembangkan oleh Carol Bacchi. Pendekatan WPR memandang bahwa masalah kebijakan tidak hadir secara netral, melainkan dibentuk melalui representasi tertentu. (Bacchi, 1948). Kebijakan dapat mendorong UMKM menggunakan QRIS atau platform digital, tetapi belum tentu mengajarkan bagaimana transaksi digital dicatat dalam buku kas. Kebijakan dapat mendorong akses pembiayaan, tetapi belum tentu memastikan pelaku usaha mampu menyusun catatan keuangan sebagai dasar penilaian kelayakan usaha. Ruang sunyi inilah yang menjadi fokus kritis penelitian ini (Idrus et al, 2026). Secara akademik, penelitian ini berada pada persimpangan antara akuntansi UMKM, akuntabilitas keuangan, dan analisis kebijakan kritis. Kajian akuntansi UMKM selama ini banyak membahas penerapan SAK EMKM, literasi akuntansi, kualitas laporan keuangan, dan penggunaan sistem informasi akuntansi. Di sisi lain, kajian kebijakan UMKM lebih banyak membahas bantuan modal, pemberdayaan, digitalisasi, akses pasar, dan penguatan kelembagaan. Penelitian ini menghubungkan kedua wilayah tersebut dengan mengajukan pertanyaan kritis tentang mengapa kebijakan pemberdayaan UMKM belum selalu menjadikan masalah akuntansi sebagai pusat perhatian (Mardiani, 2026)

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan WPR untuk mengkaji representasi masalah akuntansi dalam kebijakan pemberdayaan UMKM *food street*. Penelitian (Purba, 2025; Setyasih et al, 2025; Ulvasari et al., 2025) dan yang terbaru (Mangilo et al., 2026) tentang UMKM kuliner Kota Gorontalo, lebih banyak menempatkan UMKM sebagai objek pengembangan usaha, pemasaran, dan peningkatan pendapatan. Kajian tersebut belum secara khusus membongkar bagaimana masalah akuntansi UMKM direpresentasikan dalam kebijakan pemberdayaan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa persoalan UMKM *food street* bukan hanya persoalan modal, pasar, dan digitalisasi, tetapi juga persoalan akuntabilitas keuangan yang dibentuk, diabaikan, atau disenyapkan dalam kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi masalah akuntansi dalam kebijakan pemberdayaan UMKM *food street* Kota Gorontalo dengan pendekatan WPR. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana masalah UMKM dikonstruksi dalam kebijakan, mengungkap aspek akuntansi yang kurang dipersoalkan, serta merumuskan arah pemberdayaan UMKM yang lebih responsif terhadap kebutuhan akuntabilitas keuangan pelaku usaha. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian akuntansi UMKM dan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang program pemberdayaan UMKM yang tidak hanya berorientasi pada bantuan modal dan digitalisasi, tetapi juga pada penguatan pencatatan keuangan, informasi biaya, dan kesiapan SAK EMKM.

KAJIAN PUSTAKA

Entity Theory

Entity Theory merupakan teori dasar dalam akuntansi yang memandang usaha sebagai entitas ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Pemisahan ini menjadi dasar pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Dalam perspektif ini, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban harus dicatat sebagai bagian dari aktivitas usaha, bukan sebagai bagian dari keuangan pribadi pemilik (Hidayati et al., 2024). Teori ini relevan digunakan untuk membaca praktik akuntansi UMKM food street karena pelaku usaha mikro umumnya merangkap sebagai pemilik, pengelola, kasir, pembeli bahan baku, sekaligus pengguna hasil usaha untuk kebutuhan rumah tangga.

Pada UMKM *food street*, transaksi usaha berlangsung harian, cepat, dan sering berbasis kas. Uang hasil penjualan dapat langsung digunakan untuk membeli bahan baku, membayar kebutuhan keluarga, membayar utang pribadi, atau memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan batas antara keuangan usaha dan keuangan pribadi menjadi kabur (Idrus et al, 2026). Bercampurnya keuangan usaha dan rumah tangga menghambat pelaku UMKM dalam mengetahui laba bersih, modal yang masih berputar, biaya produksi, serta posisi keuangan usaha secara wajar (Herawati, 2025)

Dalam penelitian ini, *Entity Theory* digunakan sebagai grand theory untuk menjelaskan pentingnya pemisahan keuangan usaha dan pribadi. Prinsip entitas menjadi fondasi akuntabilitas keuangan UMKM karena tanpa pemisahan tersebut, pelaku usaha sulit menyusun catatan kas, menghitung laba, menilai modal, mengidentifikasi utang, dan menyiapkan laporan keuangan sederhana. Oleh karena itu, UMKM food street perlu dipahami sebagai entitas ekonomi, bukan sekadar perpanjangan dari keuangan rumah tangga pemilik.

Accounting Information Theory

Accounting Information Theory menjelaskan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan data keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengetahui posisi keuangan, mengukur kinerja, mengendalikan biaya, menilai laba, mengelola kas, dan merencanakan pengembangan usaha. Dalam UMKM, pengguna utama informasi akuntansi adalah pemilik usaha itu sendiri (Mariana et al, 2017).

Pada UMKM food street, informasi akuntansi tidak harus berbentuk sistem yang kompleks. Catatan kas masuk, kas keluar, pembelian bahan baku, penjualan harian, utang, piutang, dan laba sederhana sudah memiliki nilai penting bagi keputusan usaha. Informasi tersebut membantu pelaku usaha mengetahui omzet, menghitung biaya produksi, mengendalikan pengeluaran, mengevaluasi keuntungan, dan menjaga kepercayaan pihak lain. Tanpa informasi akuntansi, pelaku UMKM cenderung mengambil keputusan berdasarkan ingatan, kebiasaan, dan perkiraan (Safitri, 2025).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa literasi akuntansi dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akurasi pencatatan keuangan UMKM. Maharani (2025) menjelaskan bahwa literasi akuntansi dan penggunaan sistem informasi akuntansi

berperan penting dalam meningkatkan ketepatan pencatatan keuangan UMKM. Dengan demikian, *Accounting Information Theory* digunakan untuk menegaskan bahwa pencatatan keuangan sederhana bukan kegiatan tambahan, melainkan fondasi pengambilan keputusan usaha dan dasar akuntabilitas UMKM *food street*.

Agency Theory

Agency Theory menjelaskan hubungan antara principal sebagai pemberi mandat dan agent sebagai penerima mandat. Teori ini menekankan adanya potensi konflik kepentingan, asimetri informasi, dan kebutuhan mekanisme pengawasan agar agent bertindak sesuai tujuan principal. Dalam akuntansi, *Agency Theory* sering digunakan untuk menjelaskan pentingnya pelaporan, pengawasan, dan akuntabilitas keuangan (Spremann, 1989).

Dalam penelitian ini, *Agency Theory* digunakan untuk membaca relasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dinas atau pendamping sebagai pelaksana program, dan pelaku UMKM sebagai penerima manfaat. Pemerintah merancang program pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan mendorong UMKM naik kelas. Namun, program tersebut dapat menghadapi masalah apabila terdapat jarak antara cara pemerintah merepresentasikan masalah UMKM dan kebutuhan nyata pelaku usaha. Jarak ini dapat dipahami sebagai bentuk asimetri informasi kebijakan (Marjuka, 2022).

Asimetri informasi muncul ketika kebijakan lebih banyak melihat masalah UMKM dari sisi modal, pemasaran, digitalisasi, atau legalitas, sementara pelaku UMKM menghadapi persoalan keuangan harian yang lebih mendasar. Pelaku UMKM membutuhkan kemampuan mencatat penjualan, menghitung biaya, memisahkan uang usaha dan rumah tangga, mengetahui laba, serta menyiapkan catatan sederhana untuk akses pembiayaan. Apabila kebutuhan ini tidak terbaca oleh pembuat kebijakan, maka program pemberdayaan berisiko tidak menyentuh akar masalah akuntansi. Oleh karena itu, *Agency Theory* mendukung analisis WPR karena keduanya membuka ruang untuk membaca representasi masalah, informasi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam kebijakan pemberdayaan UMKM (Piola, 2023)

Akuntabilitas Keuangan UMKM

Akuntabilitas keuangan merupakan kemampuan untuk mencatat, mengelola, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya keuangan secara wajar. Dalam UMKM, akuntabilitas keuangan dapat diwujudkan melalui praktik sederhana, seperti pencatatan kas harian, pemisahan uang usaha dan pribadi, penyimpanan bukti transaksi, pencatatan utang-piutang, perhitungan biaya, dan penyusunan laporan laba rugi sederhana. Akuntabilitas keuangan penting karena usaha mikro tetap menggunakan sumber daya ekonomi yang harus dikelola, seperti modal, bahan baku, peralatan, kas, utang, dan pendapatan (Nur Hidayati, S.E. et al., 2024).

Pada UMKM *food street*, akuntabilitas keuangan tampak dalam kemampuan pelaku usaha mengetahui jumlah bahan baku yang dibeli, pendapatan penjualan, biaya yang dikeluarkan, dan laba yang dapat disisihkan. Informasi tersebut membantu pelaku usaha mengevaluasi harga jual, porsi produk, efisiensi bahan baku, serta kecukupan modal untuk siklus produksi berikutnya. Tanpa akuntabilitas keuangan, usaha dapat berjalan setiap hari, tetapi pelaku usaha tidak memiliki dasar yang kuat untuk menilai perkembangan usahanya. Akuntabilitas keuangan juga

berkaitan dengan akses pembiayaan. Lembaga pembiayaan membutuhkan informasi keuangan untuk menilai kelayakan usaha. Pelaku UMKM yang tidak memiliki catatan keuangan sering kesulitan menunjukkan omzet, laba, arus kas, aset, dan utang. Akibatnya, UMKM sulit membuktikan kapasitas ekonominya secara tertulis. Dalam penelitian ini, akuntabilitas keuangan dipahami sebagai kemampuan pelaku UMKM food street untuk mencatat, memisahkan, menghitung, dan menjelaskan transaksi keuangan usaha secara sederhana (Welem et al., 2026).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang disusun untuk membantu UMKM menyusun laporan keuangan secara sederhana. Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa SAK EMKM berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 dan disusun sebagai standar akuntansi yang berdiri sendiri untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM setidaknya mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (Ayem et al., 2024; Setyasih et al, 2025)

SAK EMKM berperan penting karena menyediakan rujukan formal bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala, seperti rendahnya pemahaman akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya kebiasaan mencatat transaksi, minimnya bukti transaksi, dan anggapan bahwa laporan keuangan hanya diperlukan oleh usaha besar. Penelitian tahun 2025 menunjukkan bahwa UMKM masih sering menghadapi masalah dalam mengelola laporan keuangan sesuai SAK EMKM meskipun standar tersebut telah lama diberlakukan (Puteri, 2026)

Dalam penelitian ini, SAK EMKM digunakan sebagai standar operasional untuk membaca kesiapan akuntansi UMKM food street Kota Gorontalo. Kesiapan tersebut tidak dimaknai sebagai kemampuan menyusun laporan keuangan lengkap, tetapi dilihat dari praktik dasar yang menjadi prasyarat penerapan SAK EMKM. Praktik tersebut meliputi pencatatan transaksi harian, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, penyimpanan bukti transaksi, pencatatan aset, pencatatan utang, perhitungan biaya, dan pemahaman laba.

Kebijakan Pemberdayaan UMKM

Kebijakan pemberdayaan UMKM merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, daya tahan, dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan ini biasanya diwujudkan melalui bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, digitalisasi, legalitas usaha, sertifikasi produk, akses pembiayaan, promosi, kemitraan, dan perluasan pasar. Kebijakan tersebut lahir dari pengakuan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian, tetapi menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas usaha (Hasanah & Suhma, 2025). Dalam narasi kebijakan, UMKM sering diposisikan sebagai sektor yang perlu “naik kelas”. Namun, naik kelas tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai peningkatan omzet, penggunaan media sosial, kepemilikan legalitas, atau penerimaan bantuan modal. Naik kelas juga perlu dimaknai sebagai peningkatan tata kelola keuangan. Kebijakan yang hanya memusatkan perhatian pada modal, pasar, teknologi, dan legalitas dapat menjadi tidak lengkap apabila pencatatan keuangan tidak dibaca sebagai prioritas (Mozin & Husain, 2021)

Pada UMKM *food street* Kota Gorontalo, kebijakan pemberdayaan perlu memperhatikan

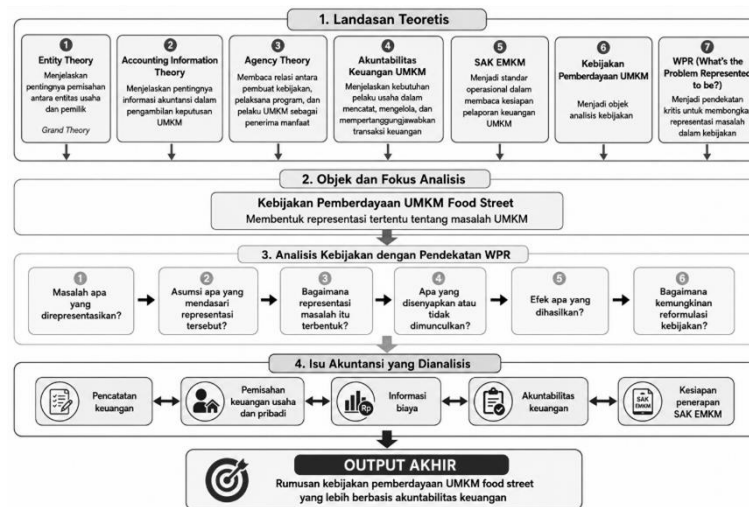
karakter usaha kuliner jalanan yang memiliki transaksi harian, perputaran kas cepat, biaya bahan baku yang berubah, dan penggunaan kas yang dekat dengan kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak cukup hanya dilakukan melalui bantuan atau pelatihan umum. Pelaku UMKM membutuhkan pendampingan pencatatan kas harian, perhitungan harga pokok produksi sederhana, pemisahan uang usaha dan pribadi, penggunaan bukti transaksi, serta pengenalan laporan keuangan sederhana. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM berbasis akuntabilitas keuangan dapat memperkuat dasar pengambilan keputusan dan meningkatkan peluang akses pembiayaan.

Pendekatan *What is the Problem Represented to be (WPR)*

Pendekatan *What is the Problem Represented to be* atau WPR dikembangkan oleh Carol Bacchi sebagai pendekatan analisis kebijakan kritis. WPR berpijak pada pandangan bahwa kebijakan tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membentuk cara tertentu dalam memahami masalah. Masalah kebijakan tidak hadir secara netral, melainkan direpresentasikan melalui bahasa, asumsi, kategori, dan logika tertentu. Oleh karena itu, analisis kebijakan perlu bertanya bagaimana suatu masalah direpresentasikan dalam kebijakan (Bacchi, 1948). WPR relevan digunakan dalam penelitian ini karena kebijakan pemberdayaan UMKM sering membawa representasi tertentu tentang masalah UMKM. Menurut Piola (2023) UMKM dapat direpresentasikan sebagai kurang modal, kurang digital, kurang legalitas, kurang inovasi, atau kurang akses pasar. Setiap representasi menghasilkan solusi tertentu. Apabila masalah direpresentasikan sebagai kurang modal, maka solusi yang muncul adalah bantuan modal. Apabila masalah direpresentasikan sebagai belum digital, maka solusi yang muncul adalah pelatihan digital. Namun, apabila masalah akuntansi tidak direpresentasikan sebagai masalah, maka solusi akuntansi tidak menjadi prioritas.

Bacchi (1948) merumuskan enam pertanyaan utama dalam WPR, yaitu: (1) bagaimana masalah direpresentasikan; (2) asumsi apa yang mendasarinya; (3) bagaimana representasi masalah terbentuk; (4) apa yang tidak dipersoalkan; (5) efek apa yang dihasilkan; (6) serta bagaimana representasi tersebut diproduksi, disebarkan, dipertahankan, dan dapat dipertanyakan. WPR terus digunakan dalam studi kebijakan kritis karena mampu mengungkap bagaimana problematika kebijakan dikonstruksi dan dipertahankan. Dalam penelitian ini, WPR digunakan untuk membaca apakah kebijakan pemberdayaan UMKM telah menempatkan akuntabilitas keuangan sebagai masalah penting. Pertanyaan WPR diarahkan pada pencatatan kas, pemisahan uang usaha dan pribadi, perhitungan biaya, pengukuran laba, bukti transaksi, dan kesiapan SAK UMKM. Dengan demikian, WPR membantu penelitian ini bergerak dari deskripsi praktik akuntansi UMKM menuju kritik terhadap representasi masalah dalam kebijakan pemberdayaan UMKM.

Kerangka Konseptual Kajian



Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber. Data Diolah (Peneliti,2026)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif kritis dengan pendekatan *What is the Problem Represented to be* atau WPR dari (Bacchi, 1948). Desain ini dipilih karena penelitian tidak hanya mendeskripsikan praktik akuntansi UMKM *food street*, tetapi juga mengkaji bagaimana masalah akuntansi UMKM direpresentasikan, diabaikan, atau disenyapkan dalam kebijakan pemberdayaan UMKM. Penelitian dilakukan di Kota Gorontalo dengan fokus pada UMKM *food street* atau pelaku usaha kuliner jalanan yang menjalankan aktivitas usaha makanan dan minuman pada kawasan ekonomi perkotaan. Pemilihan UMKM *food street* didasarkan pada karakteristik usahanya yang memiliki transaksi harian, perputaran kas cepat, modal relatif kecil, hubungan langsung dengan konsumen, serta potensi bercampurnya keuangan usaha dan keuangan rumah tangga. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap praktik usaha serta kebijakan pemberdayaan UMKM. Informan utama adalah pelaku UMKM *food street* Kota Gorontalo yang telah menjalankan usaha minimal satu tahun, memiliki transaksi penjualan harian, dan mengelola kas usaha secara langsung. Informan pendukung meliputi unsur dinas atau pemerintah daerah yang membidangi UMKM, pendamping UMKM, perbankan atau koperasi pembiayaan, akademisi akuntansi, dan komunitas UMKM. Jumlah informan direncanakan sebanyak 18 orang, terdiri atas 10 pelaku UMKM *food street* dan 8 informan pendukung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberi ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara terbuka. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi dokumen. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari pelaku UMKM *food street*, dinas terkait, pendamping UMKM, lembaga pembiayaan,

akademisi akuntansi, dan komunitas UMKM. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi dokumen dilakukan dengan membandingkan narasi dalam dokumen program, berita resmi, regulasi, dan data lapangan. Etika penelitian dijaga dengan meminta persetujuan informan, menjaga kerahasiaan identitas apabila diperlukan, dan menggunakan data hanya untuk kepentingan penelitian.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif kritis berbasis enam pertanyaan WPR. Proses analisis diawali dengan membaca dokumen kebijakan atau program pemberdayaan UMKM untuk menemukan istilah, narasi, kategori, prioritas, dan solusi yang ditawarkan. Data wawancara dan observasi kemudian digunakan untuk membandingkan representasi masalah dalam kebijakan dengan pengalaman nyata pelaku UMKM *food street*. Analisis dilakukan melalui reduksi data, pengkodean tematik, penyajian data dalam matriks WPR, interpretasi kritis, dan penarikan kesimpulan. Daftar Pertanyaan dijelaskan dalam tabel matriks analisis WPR berikut:

Tabel 1. Matriks Analisis WPR dalam Penelitian

Pertanyaan WPR	Fokus Analisis	Sumber Data	Fokus Akuntansi
<i>What is the problem represented to be?</i>	Representasi masalah UMKM dalam kebijakan	Dokumen program, wawancara dinas, berita resmi	Apakah pencatatan keuangan muncul sebagai masalah utama
<i>What assumptions underlie the representation?</i>	Asumsi kebijakan tentang UMKM naik kelas	Dokumen program, wawancara pendamping, pelaku UMKM	Apakah kebijakan mengasumsikan pelaku UMKM mampu mengelola informasi keuangan
<i>How has the representation come about?</i>	Proses terbentuknya representasi masalah	Dokumen kebijakan, narasi program, pengalaman informan	Apakah agenda akuntansi UMKM menjadi prioritas program
<i>What is left unproblematic?</i>	Aspek yang tidak dipersoalkan	Wawancara, observasi, dokumen program	Pencatatan kas, pemisahan uang, HPP, laba, bukti transaksi, SAK EMKM
<i>What effects are produced?</i>	Dampak representasi masalah	Wawancara pelaku UMKM, observasi praktik keuangan	Dampak terhadap laba, modal, akses pembiayaan, dan akuntabilitas keuangan
<i>How is it produced and defended?</i>	Cara representasi dipertahankan dan kemungkinan reformulasi	Seluruh data penelitian	Reformulasi kebijakan berbasis akuntabilitas keuangan UMKM

Sumber. Data Diolah (Peneliti,2026)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM *food street* Kota Gorontalo cenderung merepresentasikan masalah UMKM sebagai persoalan modal, digitalisasi, legalitas, dan akses pasar. Representasi tersebut tampak dari program bantuan usaha, pelatihan pemasaran digital, fasilitasi legalitas usaha, dan promosi produk. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku UMKM juga menghadapi persoalan akuntansi dasar yang belum sepenuhnya tersentuh dalam kebijakan pemberdayaan. Salah satu informan pelaku UMKM menjelaskan:

“Kalau uang jualan itu biasanya langsung dipakai lagi untuk beli bahan. Kadang juga dipakai untuk kebutuhan rumah. Saya tidak pisahkan khusus uang usaha dan uang rumah tangga.” (UMKM-ZN)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemisahan keuangan usaha dan pribadi belum dilakukan secara konsisten. Dalam perspektif *Entity Theory*, kondisi ini mengindikasikan bahwa usaha belum sepenuhnya dipahami sebagai entitas ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Ketika uang usaha dan uang rumah tangga bercampur, pelaku UMKM sulit mengetahui modal yang masih tersedia, laba bersih yang diperoleh, dan biaya yang telah dikeluarkan. Temuan lain menunjukkan bahwa pencatatan kas harian belum menjadi kebiasaan utama pelaku UMKM *food street*. Sebagian pelaku usaha masih mengandalkan ingatan dalam menghitung penjualan dan pengeluaran. Hal ini terlihat dari pernyataan informan berikut:

“Saya jarang mencatat penjualan setiap hari. Biasanya saya lihat saja dari uang yang tersisa. Kalau bahan habis dan uang masih ada, berarti ada untung.” (UMKM- KY)

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa laba masih dipahami secara sederhana sebagai sisa kas harian. Padahal, dalam akuntansi, laba perlu dihitung dengan membandingkan pendapatan dan seluruh biaya yang dikeluarkan. Pengeluaran untuk bahan baku, gas, kemasan, transportasi, listrik, dan kebutuhan operasional lain perlu dicatat agar laba dapat diketahui secara lebih wajar. Temuan ini sejalan dengan *Accounting Information Theory* yang menempatkan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan usaha. Selain pencatatan kas, pelaku UMKM juga menghadapi kendala dalam menghitung biaya produksi. Harga jual sering ditentukan berdasarkan harga pasar atau kebiasaan, bukan berdasarkan perhitungan biaya secara lengkap. Informan UMKM menyampaikan:

“Harga saya ikut harga penjual lain. Kalau dihitung semua biaya, saya belum pernah hitung sampai gas, minyak, plastik, atau ongkos. Yang penting masih bisa jual dan modal kembali.” (UMKM-TO)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi biaya belum digunakan secara optimal dalam penentuan harga jual. Kondisi ini dapat menyebabkan pelaku UMKM tidak mengetahui margin keuntungan yang sebenarnya. Pada usaha kuliner jalanan, biaya kecil yang berulang setiap hari dapat memengaruhi laba secara signifikan apabila tidak dicatat dan dihitung secara sistematis. Dari sisi pelaksana program, hasil wawancara menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM memang masih lebih banyak diarahkan pada legalitas, pemasaran, dan digitalisasi. Salah satu informan dari unsur pendamping UMKM menyatakan:

“Selama ini kegiatan yang sering dilakukan lebih banyak terkait NIB, pemasaran digital, kemasan, dan promosi produk. Untuk pencatatan keuangan memang ada, tetapi belum terlalu mendalam dan belum semua UMKM mengikuti.” (Pendamping UMKM 1)

Kutipan tersebut memperkuat temuan bahwa aspek akuntansi belum menjadi pusat perhatian dalam program pemberdayaan. Program pencatatan keuangan belum menjadi agenda

utama yang terintegrasi dengan bantuan modal, digitalisasi, dan akses pembiayaan. Dalam perspektif WPR, hal ini menunjukkan bahwa masalah UMKM lebih kuat direpresentasikan sebagai masalah legalitas, pasar, dan digitalisasi, sedangkan masalah akuntansi belum direpresentasikan sebagai persoalan utama. Asimetri informasi antara pemerintah atau pelaksana program dan pelaku UMKM juga tampak dari perbedaan cara memahami kebutuhan pemberdayaan. Pemerintah dan pendamping program lebih banyak menekankan indikator administratif, sedangkan pelaku UMKM menghadapi persoalan keuangan harian. Informan dari pelaku UMKM menyatakan:

“Kalau pelatihan biasa diajarkan jualan online atau urus izin. Tapi kami juga sebenarnya butuh diajarkan cara mencatat uang masuk, uang keluar, dan menghitung untung yang benar.” (UMKM-DM)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akuntansi yang belum sepenuhnya terbaca dalam desain program. Dalam perspektif *Agency Theory*, kondisi ini mencerminkan asimetri informasi antara pemerintah sebagai principal kebijakan, dinas atau pendamping sebagai agent pelaksana program, dan pelaku UMKM sebagai penerima manfaat. Kebijakan dapat menganggap digitalisasi dan legalitas sebagai kebutuhan utama, sementara pelaku UMKM membutuhkan pendampingan akuntansi yang lebih praktis dan dekat dengan aktivitas usaha harian. Terkait kesiapan SAK EMKM, sebagian pelaku UMKM belum memahami laporan keuangan sederhana. Istilah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, atau catatan atas laporan keuangan masih dianggap sulit. Hal ini tampak dari pernyataan informan berikut:

“Saya belum tahu SAK EMKM itu apa. Kalau laporan keuangan juga belum pernah buat. Paling hanya ingat-ingat saja berapa belanja bahan dan berapa uang masuk.” (UMKM-SU)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM tidak dapat langsung dilakukan dalam bentuk laporan formal. Pelaku UMKM membutuhkan tahapan yang lebih sederhana, dimulai dari buku kas harian, catatan pembelian, catatan penjualan, pencatatan utang, dan laporan laba rugi sederhana. Oleh karena itu, SAK EMKM perlu diterjemahkan ke dalam format praktis yang sesuai dengan kapasitas pelaku *UMKM food street*. Berdasarkan bukti empiris tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa masalah akuntansi UMKM *food street* bukan hanya persoalan teknis pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan cara kebijakan merepresentasikan masalah pemberdayaan. Ketika kebijakan lebih kuat menampilkan masalah modal, digitalisasi, legalitas, dan pemasaran, maka pencatatan keuangan, pemisahan kas, perhitungan biaya, pengukuran laba, bukti transaksi, dan kesiapan SAK EMKM menjadi kurang terlihat. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan UMKM perlu direformulasi dengan menempatkan akuntabilitas keuangan sebagai fondasi UMKM naik kelas.

PEMBAHASAN

Representasi Masalah UMKM dalam Kebijakan Pemberdayaan

Hasil penelusuran terhadap narasi kebijakan dan program pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa masalah UMKM umumnya direpresentasikan sebagai keterbatasan modal, lemahnya akses pasar, rendahnya kemampuan digital, belum kuatnya legalitas usaha, dan perlunya

peningkatan kapasitas kewirausahaan. Representasi tersebut tampak pada program bantuan modal, pelatihan pemasaran digital, fasilitasi Nomor Induk Berusaha, penguatan kemasan, sertifikasi halal, dan promosi produk UMKM.

Representasi tersebut tidak sepenuhnya keliru karena pelaku UMKM *food street* memang menghadapi keterbatasan modal, persaingan usaha kuliner, ketergantungan pada pasar lokal, serta kebutuhan promosi digital. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan akuntansi belum ditempatkan sebagai masalah utama. Pelaku UMKM masih menghadapi kesulitan dalam mencatat transaksi, memisahkan uang usaha dan uang pribadi, menghitung biaya produksi, mengetahui laba bersih, menyimpan bukti transaksi, dan menyiapkan laporan keuangan sederhana. Dalam perspektif WPR, cara kebijakan merepresentasikan masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan. Ketika UMKM direpresentasikan sebagai kurang modal, solusi yang muncul adalah bantuan modal. Ketika UMKM direpresentasikan sebagai belum digital, solusi yang muncul adalah pelatihan digital. Ketika UMKM direpresentasikan sebagai belum legal, solusi yang muncul adalah fasilitasi legalitas. Namun, ketika masalah akuntansi tidak direpresentasikan secara kuat, maka pencatatan keuangan, pemisahan kas, perhitungan biaya, dan kesiapan SAK EMKM tidak menjadi prioritas pemberdayaan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara narasi kebijakan dan kebutuhan akuntansi pelaku UMKM. Kebijakan lebih banyak melihat UMKM dari sisi penguatan usaha secara umum, sedangkan pelaku UMKM *food street* menghadapi persoalan keuangan harian yang sangat teknis. Pencatatan keuangan bukan sekadar urusan administratif, tetapi menjadi dasar untuk mengetahui modal, biaya, laba, dan keberlanjutan usaha.

Asumsi yang Mendasari Representasi Masalah

Representasi masalah UMKM sebagai kurang modal, kurang pasar, belum digital, dan belum legal didasarkan pada asumsi bahwa hambatan utama UMKM berasal dari keterbatasan sumber daya eksternal. Dengan asumsi tersebut, kebijakan diarahkan pada pemberian bantuan, pelatihan, akses pembiayaan, promosi, digitalisasi, dan legalitas usaha. Kebijakan juga cenderung mengasumsikan bahwa pelaku UMKM telah memiliki kapasitas dasar untuk mengelola bantuan dan fasilitas yang diberikan. Asumsi tersebut perlu dibaca secara kritis dari perspektif akuntansi. Bantuan modal tidak selalu berdampak optimal apabila pelaku UMKM tidak memiliki catatan penggunaan modal. Digitalisasi pemasaran tidak otomatis meningkatkan kinerja apabila transaksi yang meningkat tidak dicatat sebagai informasi keuangan. Legalitas usaha juga belum cukup untuk mendorong akses pembiayaan apabila pelaku usaha tidak memiliki catatan omzet, laba, arus kas, dan aset usaha.

Pada UMKM *food street*, pendapatan harian sering langsung digunakan untuk kebutuhan usaha sekaligus kebutuhan rumah tangga. Praktik ini dapat dipahami karena usaha *food street* umumnya menjadi sumber pendapatan keluarga. Namun, dari sisi akuntansi, kondisi tersebut membuat pelaku usaha sulit mengetahui modal yang masih tersedia, laba yang diperoleh, dan biaya yang telah dikeluarkan. Dalam kerangka *Entity Theory*, usaha seharusnya dipandang sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Ketika prinsip entitas tidak diterapkan, informasi keuangan usaha menjadi kabur dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Asumsi kebijakan yang terlalu menekankan bantuan, legalitas, dan digitalisasi dapat menyebabkan akuntansi dasar

tidak menjadi prioritas. Pelatihan digital dapat meningkatkan promosi, tetapi belum tentu mengubah kebiasaan pencatatan. Fasilitas legalitas dapat membuat usaha lebih formal, tetapi belum tentu membuat pelaku usaha mampu menyusun laporan laba rugi sederhana. Akses pembiayaan dapat dibuka, tetapi pelaku UMKM tetap sulit memenuhi syarat apabila tidak memiliki catatan keuangan.

Aspek Akuntansi yang Tidak Dipersoalkan

Pertanyaan keempat WPR digunakan untuk melihat aspek yang tidak dipersoalkan atau disenyapkan dalam representasi masalah kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat enam aspek akuntansi yang belum menjadi perhatian dominan dalam kebijakan pemberdayaan UMKM *food street*. *Pertama*, pencatatan kas harian belum menjadi kebiasaan yang kuat. Sebagian pelaku usaha mencatat penjualan hanya ketika diperlukan, sedangkan sebagian lain mengandalkan ingatan. Transaksi kecil yang terjadi berkali-kali dalam sehari sering tidak dicatat secara tertib. *Kedua*, pemisahan uang usaha dan uang pribadi belum dilakukan secara konsisten. Uang hasil penjualan sering digunakan untuk membeli bahan baku sekaligus memenuhi kebutuhan rumah tangga. *Ketiga*, perhitungan harga pokok produksi sederhana belum menjadi dasar utama penentuan harga jual. Harga sering ditentukan berdasarkan harga pasar, kebiasaan, atau harga pesaing. *Keempat*, pengukuran laba masih dipahami secara sederhana. Laba sering dimaknai sebagai sisa uang setelah membeli bahan baku, padahal masih terdapat biaya gas, kemasan, transportasi, listrik, tenaga kerja keluarga, dan penyusutan peralatan. *Kelima*, bukti transaksi belum dikelola dengan baik. Nota pembelian, bukti transfer, catatan utang, dan bukti pembayaran digital sering tidak disimpan secara sistematis. *Keenam*, kesiapan penerapan SAK EMKM masih rendah. Pelaku UMKM *food street* belum sepenuhnya mengenal laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

Tabel 2. Aspek Akuntansi yang Kurang Terlihat dalam Kebijakan Pemberdayaan
UMKM Food Street

Aspek Akuntansi	Kondisi pada UMKM Food Street	Dampak terhadap Usaha
<i>Pencatatan kas harian</i>	Belum rutin dan sering berbasis ingatan	Omzet dan arus kas sulit dipastikan
<i>Pemisahan uang usaha dan pribadi</i>	Masih bercampur dengan kebutuhan rumah tangga	Modal usaha sulit dikendalikan
<i>Perhitungan biaya</i>	Harga jual sering mengikuti pasar atau kebiasaan	Laba tidak dihitung secara akurat
<i>Pengukuran laba</i>	Laba dipahami sebagai sisa uang harian	Kinerja usaha sulit dievaluasi
<i>Bukti transaksi</i>	Nota dan bukti digital belum tersimpan rapi	Pengeluaran sulit ditelusuri
<i>SAK EMKM</i>	Belum dipahami secara teknis	Laporan keuangan belum siap disusun

Sumber. Data Diolah (Peneliti, 2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa aspek akuntansi yang kurang dipersoalkan justru merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan usaha. Kebijakan pemberdayaan UMKM yang tidak memasukkan aspek ini sebagai kebutuhan utama berisiko menghasilkan program yang tidak menyentuh akar masalah tata kelola keuangan.

Efek Representasi Masalah terhadap Praktik Keuangan UMKM

Representasi masalah kebijakan menghasilkan efek nyata terhadap praktik keuangan pelaku UMKM. Ketika kebijakan lebih banyak menampilkan masalah modal, digitalisasi, legalitas, dan pemasaran, program yang dihasilkan juga lebih berorientasi pada aspek tersebut.

Akibatnya, pelaku UMKM dapat memperoleh bantuan atau pelatihan, tetapi praktik pencatatan keuangan belum berubah secara signifikan. *Efek pertama* adalah lemahnya evaluasi kinerja usaha. Pelaku UMKM yang tidak memiliki catatan keuangan sulit mengetahui perkembangan omzet, biaya, dan laba. Usaha dapat terlihat ramai, tetapi belum tentu menghasilkan keuntungan yang memadai. *Efek kedua* adalah sulitnya menjaga modal usaha. Ketika uang usaha dan uang pribadi bercampur, modal dapat terpakai untuk kebutuhan rumah tangga tanpa disadari. Dalam kondisi ini, pelaku usaha dapat merasa membutuhkan tambahan modal, padahal persoalan utamanya adalah lemahnya pengendalian kas. *Efek ketiga* adalah lemahnya dasar penentuan harga jual. Tanpa perhitungan biaya yang memadai, pelaku UMKM dapat menjual produk dengan harga yang tidak mencerminkan seluruh biaya. Kenaikan harga bahan baku dapat menurunkan margin laba apabila biaya tidak dihitung secara lengkap. *Efek keempat* adalah terbatasnya akses pembiayaan formal. Lembaga pembiayaan membutuhkan informasi keuangan untuk menilai kelayakan usaha. Pelaku UMKM yang tidak memiliki catatan keuangan sulit menunjukkan omzet, laba, arus kas, dan kemampuan membayar. *Efek kelima* adalah rendahnya kesiapan terhadap SAK EMKM. Standar akuntansi untuk UMKM tidak dapat diterapkan apabila praktik dasar pencatatan belum terbentuk. Pelaku UMKM tidak dapat menyusun laporan laba rugi apabila tidak mencatat pendapatan dan beban. Pelaku UMKM juga tidak dapat menyusun laporan posisi keuangan apabila tidak memiliki catatan aset, utang, dan modal.

Reformulasi Representasi Masalah Berbasis Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil analisis WPR, penelitian ini menawarkan reformulasi representasi masalah dalam kebijakan pemberdayaan UMKM. UMKM food street tidak cukup direpresentasikan sebagai pelaku usaha yang kurang modal, kurang pasar, belum digital, atau belum legal. UMKM food street perlu direpresentasikan sebagai entitas ekonomi yang membutuhkan akuntabilitas keuangan. Representasi baru yang ditawarkan adalah “UMKM naik kelas melalui akuntabilitas keuangan”. Representasi ini tidak menolak pentingnya modal, digitalisasi, legalitas, dan pemasaran. Sebaliknya, akuntabilitas keuangan ditempatkan sebagai fondasi agar seluruh program pemberdayaan dapat berdampak lebih terukur. Bantuan modal perlu didukung catatan penggunaan modal. Digitalisasi perlu didukung pencatatan transaksi digital. Legalitas usaha perlu diikuti laporan keuangan sederhana. Akses pembiayaan perlu didukung catatan omzet, laba, arus kas, dan aset usaha.

Tabel 3. Reformulasi Kebijakan Pemberdayaan
UMKM Food Street Berbasis Akuntabilitas Keuangan

Representasi Lama	Solusi Lama	Representasi Baru	Solusi Akuntansi yang Diusulkan
UMKM kurang modal	Bantuan modal	UMKM lemah mengelola modal	Buku kas, pemisahan kas, catatan penggunaan modal
UMKM belum digital	Pelatihan media sosial/QRIS	UMKM belum mencatat transaksi digital	Integrasi transaksi digital dalam catatan kas
UMKM belum legal	Fasilitasi NIB/sertifikasi	UMKM belum siap administrasi keuangan	Catatan aset, omzet, laba, dan bukti transaksi
UMKM sulit akses pembiayaan	Linkage perbankan	UMKM belum memiliki informasi keuangan	Laporan laba rugi sederhana dan arus kas
UMKM kurang pemasaran	Promosi dan bazar	UMKM belum mengetahui dampak promosi terhadap laba	

Sumber. Data Diolah (Peneliti,2026)

Matriks Hasil Analisis WPR

Adapun hasil penelitian ini dapat dirangkum dalam matriks analisis WPR berikut:

Tabel 4. Matriks Hasil Analisis WPR

Pertanyaan WPR	Temuan Penelitian	Interpretasi Akuntansi
<i>Apa masalah direpresentasikan?</i>	UMKM direpresentasikan sebagai kurang modal, belum digital, kurang pasar, dan belum legal	Masalah pencatatan keuangan belum menjadi representasi dominan
<i>Asumsi apa yang mendasari?</i>	Bantuan, digitalisasi, legalitas, dan promosi dianggap cukup untuk menaikkan kelas UMKM	Kebijakan belum cukup membaca keterbatasan informasi akuntansi pelaku usaha
<i>Bagaimana representasi terbentuk?</i>	Melalui agenda UMKM naik kelas, program bantuan, pelatihan digital, dan fasilitasi legalitas	Akuntansi belum menjadi indikator utama keberhasilan pemberdayaan
<i>Apa yang tidak dipersoalkan?</i>	Pencatatan kas, pemisahan keuangan, HPP, laba, bukti transaksi, dan SAK EMKM	Aspek dasar akuntabilitas keuangan tersenyapkan
<i>Efek apa yang dihasilkan?</i>	Pelaku UMKM mendapat dukungan usaha, tetapi praktik keuangan belum berubah signifikan	UMKM tetap sulit menghitung laba, menjaga modal, dan mengakses pembiayaan
<i>Bagaimana direformulasi?</i>	UMKM perlu direpresentasikan sebagai entitas ekonomi yang membutuhkan akuntabilitas keuangan	Pemberdayaan perlu memasukkan pencatatan, pemisahan kas, HPP, laba rugi, dan SAK EMKM

Sumber. Data Diolah (Peneliti,2026)

Matriks tersebut menunjukkan bahwa pendekatan WPR mampu mengungkap keterbatasan representasi masalah dalam kebijakan pemberdayaan UMKM. Kebijakan yang terlalu menekankan modal, digitalisasi, dan pasar dapat mengabaikan persoalan akuntansi dasar. Padahal, akuntabilitas keuangan merupakan prasyarat penting bagi UMKM untuk berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Pembahasan Teoretis.

Temuan penelitian ini memperkuat relevansi *Entity Theory* dalam memahami praktik keuangan UMKM *food street*. Usaha mikro tetap perlu dipandang sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Pemisahan tersebut menjadi dasar pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan. Ketika pelaku UMKM belum memisahkan uang usaha dan uang pribadi, maka informasi keuangan usaha menjadi tidak jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip entitas belum sepenuhnya hadir dalam praktik akuntansi UMKM *food street*.

Temuan ini juga sejalan dengan *Accounting Information Theory*. Informasi akuntansi diperlukan untuk mendukung keputusan usaha. Pada UMKM *food street*, informasi akuntansi membantu pelaku usaha mengetahui omzet, biaya, laba, modal, dan kemampuan bertahan. Tanpa informasi akuntansi, keputusan usaha didasarkan pada perkiraan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesalahan dalam menentukan harga, mengelola modal, dan menilai keberhasilan usaha. Dari perspektif *Agency Theory*, temuan penelitian menunjukkan adanya jarak antara representasi masalah kebijakan dan kebutuhan pelaku UMKM. Pemerintah atau pelaksana program dapat menganggap bahwa masalah utama UMKM adalah modal, digitalisasi, dan legalitas. Dari perspektif *Agency Theory*, temuan penelitian ini menunjukkan adanya hubungan *principal-agent* dalam kebijakan pemberdayaan UMKM. Pemerintah daerah dapat dipahami sebagai *principal* karena memiliki mandat untuk meningkatkan kapasitas UMKM melalui

kebijakan dan program pemberdayaan. Dinas teknis atau pendamping UMKM berperan sebagai agent pelaksana program yang menerjemahkan mandat tersebut ke dalam kegiatan bantuan modal, pelatihan, legalitas, digitalisasi, dan promosi. Pelaku UMKM food street berada pada posisi penerima manfaat yang mengalami langsung persoalan usaha dan menjadi sumber informasi penting bagi perbaikan kebijakan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi muncul ketika pemerintah dan pelaksana program lebih banyak merepresentasikan masalah UMKM sebagai persoalan modal, pasar, digitalisasi, dan legalitas, sedangkan pelaku UMKM menghadapi persoalan akuntansi harian yang belum sepenuhnya terbaca dalam kebijakan. Persoalan tersebut meliputi pencatatan kas yang belum rutin, bercampurnya keuangan usaha dan pribadi, lemahnya perhitungan biaya, ketidakjelasan laba bersih, tidak tertibnya bukti transaksi, serta rendahnya kesiapan penerapan SAK EMKM. Asimetri informasi ini menyebabkan program pemberdayaan berisiko lebih kuat pada aspek administratif dan teknis usaha, tetapi belum cukup kuat pada aspek akuntabilitas keuangan.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa bantuan modal, pelatihan digital, dan fasilitasi legalitas belum tentu menghasilkan perubahan tata kelola keuangan UMKM. Bantuan modal dapat diberikan, tetapi penggunaannya sulit dievaluasi apabila pelaku usaha tidak memiliki catatan kas. Digitalisasi dapat diperkenalkan, tetapi transaksi digital tidak menjadi informasi akuntansi apabila tidak dicatat. Legalitas dapat difasilitasi, tetapi akses pembiayaan tetap terbatas apabila pelaku UMKM tidak mampu menunjukkan omzet, laba, arus kas, dan aset usaha. Dengan demikian, *Agency Theory* memperjelas bahwa masalah akuntansi UMKM bukan hanya persoalan teknis pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan kesenjangan informasi antara pembuat kebijakan, pelaksana program, dan penerima manfaat.

Penguatan *Agency Theory* dalam penelitian ini mendukung temuan WPR bahwa masalah akuntansi belum cukup direpresentasikan dalam kebijakan pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan perlu diarahkan pada pengurangan asimetri informasi melalui pendataan praktik keuangan UMKM, pendampingan pencatatan kas, pemisahan uang usaha dan pribadi, perhitungan biaya sederhana, serta pengenalan SAK EMKM secara bertahap. Dengan cara tersebut, hubungan antara pemerintah, pelaksana program, dan pelaku UMKM tidak hanya menghasilkan penyaluran program, tetapi juga membangun akuntabilitas keuangan sebagai dasar UMKM naik kelas.

Implikasi Temuan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoretis, metodologis, dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penggunaan *Entity Theory*, *Accounting Information Theory*, dan *Agency Theory* pada konteks UMKM food street. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa WPR dapat digunakan dalam kajian akuntansi untuk menganalisis bagaimana masalah akuntansi direpresentasikan dalam kebijakan pemberdayaan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah agar memasukkan akuntabilitas keuangan sebagai komponen utama pemberdayaan UMKM. Pelatihan UMKM perlu dilengkapi dengan modul pencatatan kas, pemisahan keuangan, perhitungan biaya, laporan laba rugi sederhana, dan pengenalan SAK EMKM. Bagi pelaku UMKM food street, penelitian ini

menegaskan bahwa pencatatan keuangan tidak harus rumit, tetapi harus dilakukan secara rutin agar usaha dapat dikeola secara lebih akuntabel.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM food street Kota Gorontalo cenderung merepresentasikan masalah UMKM sebagai persoalan keterbatasan modal, akses pasar, digitalisasi, legalitas, dan kapasitas kewirausahaan. Representasi tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi belum cukup menempatkan persoalan akuntansi sebagai fondasi pemberdayaan. Hasil analisis dengan pendekatan *What is the Problem Represented to be* menunjukkan bahwa pencatatan keuangan, pemisahan uang usaha dan pribadi, perhitungan biaya, pengukuran laba, penyimpanan bukti transaksi, dan kesiapan penerapan SAK EMKM masih kurang terlihat dalam kebijakan pemberdayaan UMKM. Temuan penelitian menegaskan bahwa masalah UMKM *food street* tidak hanya terletak pada modal dan pemasaran digital, tetapi juga pada lemahnya akuntabilitas keuangan. Pelaku UMKM food street menjalankan usaha dengan transaksi harian, perputaran kas cepat, modal kecil, dan hubungan langsung antara keuangan usaha dan rumah tangga. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha sulit mengetahui omzet, biaya, laba bersih, modal yang berputar, dan kemampuan usaha untuk berkembang apabila pencatatan tidak dilakukan secara rutin.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi *Entity Theory*, *Accounting Information Theory*, dan *Agency Theory* dalam kajian akuntansi UMKM. *Entity Theory* menegaskan pentingnya pemisahan usaha dan pemilik. *Accounting Information Theory* menunjukkan bahwa informasi akuntansi diperlukan untuk pengambilan keputusan usaha. *Agency Theory* membantu menjelaskan adanya jarak antara representasi masalah kebijakan dan kebutuhan nyata pelaku UMKM. Pendekatan WPR juga memperluas kajian akuntansi dengan menunjukkan bahwa rendahnya praktik pencatatan keuangan tidak hanya dapat dibaca sebagai kelemahan teknis pelaku usaha, tetapi juga sebagai akibat dari cara kebijakan merepresentasikan masalah UMKM.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan pemberdayaan UMKM dari “UMKM naik kelas melalui modal, digitalisasi, legalitas, dan pemasaran” menjadi “UMKM naik kelas melalui akuntabilitas keuangan”. Reformulasi ini tidak menolak pentingnya modal, digitalisasi, legalitas, dan promosi, tetapi menempatkan akuntansi sebagai fondasi agar seluruh program dapat diukur, dikelola, dan dipertanggungjawabkan. Program pemberdayaan UMKM food street perlu memasukkan pendampingan pencatatan kas harian, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, perhitungan harga pokok produksi sederhana, laporan laba rugi sederhana, pencatatan transaksi digital, serta pengenalan SAK EMKM secara praktis dan bertahap.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada UMKM *food street* Kota Gorontalo, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh jenis UMKM. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif kritis yang menekankan kedalaman pemahaman, bukan pengukuran statistik. Penelitian berikutnya dapat membandingkan UMKM

food street di beberapa daerah, menguji hubungan literasi akuntansi dengan kualitas pencatatan keuangan, atau merancang model pendampingan SAK EMKM berbasis praktik harian pelaku UMKM kuliner. Secara keseluruhan, pemberdayaan UMKM food street akan lebih bermakna apabila kebijakan tidak hanya membaca UMKM sebagai pelaku usaha yang membutuhkan modal dan digitalisasi, tetapi juga sebagai entitas ekonomi yang membutuhkan akuntabilitas keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Idrus, Shinta Goi, Husnul Amaliyah S, Firmansyah H. Mude, F. M. (2026). Pemahaman Dan Praktek Akuntansi Pada Pelaku Umkm : Studi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 8(3), 1833–1842.
- Anna m, Sentot Imam, Ma'ruf Syaban, A. Suwarni. (2017). *Akuntansi & Sistem Informasi Akuntansi*. Umsurabaya Publishing.
- Ayem, S., Putri, F. K., Arang, D. F., Cholifiana, F., Rambu, H., Langu, L. K. R., Putri, T. P., & Septiani, V. (2024). Systematic Literature Review: Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (Sak-Emkm) Pada Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Di Indonesia Sri. *Litera: Jurnal Literasi Akuntansi*, 4(2), 87–99. <https://doi.org/10.55587/jla.v4i2.118>
- Bacchi, C. (1948). *Introducing The "What's The Problem Represented To Be?" Approach*. Griffin Press.
- Beatrix Yunarti Manehat, F. O. S. (2022). Meninjau Penerapan Sak Emkm Pada Umkm Di Indonesia Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (Jrma)*, X(1), 2–11.
- Hasanah, S. A., & Suhma, W. K. (2025). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah Di Kabupaten Jember : Studi Kasus Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember Menulis : *Jurnal Penelitian Nusantara*. 1, 612–618.
- Hermawan, Y. S. S., & Fakultas. (2018). Persepsi Pemilik Dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Atas Penyusunan Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2).
- Iis Dewi Herawati, M. S. (2025). Strategi Pengelolaan Keuangan Pada Umkm: Perspektif Praktik Akuntansi Dan Pengendalian Internal. *Jurnal Neraca Peradaban*, 5, 23–33.
- K.Spremann, G. B. (1989). *Agency Theory, Information, And Incentives*. Springer International Publishing.
- Maharani, A. (2025). Dampak Sistem Informasi Akuntansi , Literasi Keuangan , Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Di Kabupaten Sumbawa. *Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, Vol., 8(1), 23–37.
- Mangilo, R., Casmi, A., Polamolo, N., Laboro, M. D., Mohehu, F., & Koniyo, R. (2026). Kendala Dan Strategi Pelaku Umkm Dalam Akuntansi Keuangan Di Kota Gorontalo Menerapkan. 8(3), 1808–1817.
- Mardiani, Nadila Puteri, R. G. M. (2026). Analisis Kesiapan Umkm Berbasis Digital Dalam Penerapan Sak Emkm : Studi Literatur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2026, 25–39.
- Marjuka, M. Y. (2022). Pembiayaan Mikro Umkm Desa Wisata; Kajian Ekonomi Kelembagaan. *Journal Of Tourism Destination And Attraction Wisata*, 10(1), 31–42.
- Mozin, S. Y., & Husain, S. P. (2021). Strategi Peningkatan Kemampuan Pencegahan Dan Penanganan Stunting Melalui Pengembangan Potensi Desa Di Tengah Pandemi Covid-19.



-
- Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 9(3), 182–207.
<https://doi.org/10.37905/Sibermas.V9i3.8093>
- Muhammad Sholeh, Lisnawaty W. Badu, M. T. (2025). Legalitas Retribusi Dan Praktik Pungli Terhadap Umkm Street Food Di Sekitar Kampus Universitas Negeri Gorontalo. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 3, 22–31.
<https://doi.org/10.59966/Yudhistira.V3i2.1790>
- Myrtle W.Clark. (1993). Reproduced With Permission Of The Copyright Owner. Further Reproduction Prohibited Without Permission. *American Accounting Association Accounting Horizons*, 7(14–31), 3.
- Nur Hidayati, et al. (2024). *Teori Akuntansi (Teori, Implementasi Dan Perkembangannya)*. Pt. Greenpustaka Indonesia.
- Nurhidayah, Melsa Safitri, I. B. (2025). Penerapan Sistem Akuntansi Manajemen Dalam Meningkatkan Kinerja Bisnis Usaha. *Advances In Management & Financial Reporting*, 3(2), 180–198.
- Piola, W. (2023). *Pemberdayaan Umkm Melalui Otoritas Pusat Dan Daerah Dalam Ekosistem Digital (Studi Kasus Kerjasama Bandung Dan Republik Korea)*. 931422095.
- Riztina Dwi Setyasih, Laila Rossana , Najatu Rohmah, Muftikhatur Rohmah, I. F. A. (2025). Implementasi Literasi Digital Dan Sak Emkm Pada Usaha , Mikro , Kecil , Dan Menengah. *Journal Of Business, Economics, And Finance*, 3(1), 322–335.
- Welem, R., Tahuru, N. A. S., Rahman, S., Arbie, N. A., Mohehu, F., Gorontalo, U. N., Gorontalo, U. N., Gorontalo, U. N., Gorontalo, U. N., Gorontalo, U. N., Gorontalo, U. N., & Gorontalo, U. N. (2026). *Implementasi Sistem Akuntansi Sederhana Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Umkm Di Kota Gorontalo*. 8(3), 1553–1560.



PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi
Vol. 14 No. 1 Tahun 2026, Hal. 73-91
P-ISSN: 2337-652x | E-ISSN: 2598-3252

